



Makna Laut Bagi Indonesia Secara Politik

Oleh:

Dra. Sani Safitrfi, M.Si

(sani_safitri@fkip.unsri.ac.id)

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNSRI

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan besar yang ada didunia. Dimana sekitar 2/3 wilayah negara ini merupakan lautan, belum lagi ditambahkan perairan-perairan darat seperti sungai dan danau besar di pulau-pulau Indonesia. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luas merupakan sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk melindungi kedaulatan negaranya bukan hanya di darat namun juga lautnya. Oleh sebab itu melalui perjuangan yang panjang maka Indonesia diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982.

Dengan pengakuan dunia internasional ini maka Indonesia memiliki hak untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan yang terkandung didalam lautnya. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya laut yang sangat potensial, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Hal ini tentunya memberikan peluang ekonomi yang besar untuk Indonesia. Dari sumber daya alam hayati Indonesia memiliki beragam jenis ikan, teripang, terumbu karang, dan yang lainnya. Sedangkan dalam bidang non-hayatnya, wilayah laut Indonesia diperkirakan menyimpan begitu banyak cadangan barang tambang seperti minyak bumi. Disamping itu wilayah laut Indonesia juga memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Beberapa wilayah Indonesia seperti Bali, Wakatobi, dan Raja Ampat merupakan tempat terbaik untuk melihat pantai, menyelam, dan berselancar di dunia.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum datangnya para penjajah dari Eropa ke Indonesia, nenek moyang kita merupakan bangsa yang tangguh dan berani mengarungi luasnya lautan. Bangsa ini sudah sejak lama mengenal beragam teknologi yang digunakan untuk berlayar seperti teknik pembuatan kapal, cara membaca arah angin dan bintang, serta cara berperang dilautan. Maka tak mengherankan jika beberapa kerajaan besar di Indonesia pada masa lalu terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat baik secara politis dan ekonomi (Lapian, 2008: 2-18).

Oleh sebab itu dengan melihat luasnya wilayah laut Indonesia beserta beragam potensi yang dimilikinya maka tulisan ini akan membahas bagaimana peran laut ditinjau dari kepentingan aspek politik negara Indonesia.

B. Konsep Kelautan

Laut yang menjadi “panggung dan latar” dalam tulisan ini memiliki pengertian yaitu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan dalam cakupan yang luas. Air tersebut menggenangi dan membagi daratan atas benua dan juga pulau. Sedangkan kelautan hanya dijelaskan sebagai “sesuatu atau perihal yang berhubungan dengan laut” (Tahar, 2007: 1)

Berhubungan di maksud pada istilah kelautan diatas dapat diartikan sebagai dekat, menyentuh, bersinggungan. Atau, apabila kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhubungan berarti bersangkutan (dengan); ada sangkut pautnya (dengan); bertalian (dengan); berkaitan (dengan): atau bertemu (dengan); mengadakan hubungan (dengan): atau bersambung dengan. Dari uraian pengertian ini jelas bahwa istilah kelautan lebih cenderung melihat kelautan dan laut sebagai bentuk fisiknya, sebagai *physical entity* atau *physical property*. Kelautan dalam arti luas mungkin saja dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kepentingan dengan laut sebagai hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi permukaan bumi.

Dilihat dari arti kata secara luas, kata kelautan mungkin lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi permukaan bumi, hanya melihat fisik laut dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasra laut dan tanah dibawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pesisir, pantai, pulau kecil, serta ruang udara dibatasnya.

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konsep kelautan memiliki perbedaan makna dengan konsep maritim karena konsep kelautan lebih mengutamakan sumber daya laut yang terkandung didalamnya.

C. Konsep Negara Maritim

Istilah maritim pada masa sekarang hanya dimaknai secara sangat sederhana yaitu berkenaan dengan laut, terutama pemaknaan yang berkembang di masyarakat Indonesia sendiri. Secara harfiah hal ini memang demikian adanya, maritime adalah yang berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Padahal ada beberapa aspek yang harus ditelaah dalam memaknai hal-hal yang berbau maritim. Maritim sendiri sebenarnya lebih banyak mengarah pada pengertian *state* atau pembentukan sebuah kekuasaan. Konsep negara dipandang sebagai sebuah hal yang mewakili istilah maritim, lain halnya jika kita berbicara mengenai budaya, istilah bahari lebih cocok untuk mewakili “cara hidup” masyarakat di laut (Zuhdi, 2014:62-63).

Konsep negara maritim, adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Namun disayangkan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi sumber daya laut tersebut secara maksimal. Diperlukan sebuah konsep dan strategi yang baik untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Disamping itu juga dibutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang lengkap serta keterampilan dan keahlian sumberdaya manusia yang memadai.

Disisi lain, maritim adakalanya hanya dimaksudkan pada sesuatu berhubungan dengan angkatan laut. Terkadang diartikan juga sebagai angkatan laut dalam hubungannya dengan kekuatan darat dan udara. Dalam kasus yang lain diartikan pula sebagai angkatan laut dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam kaitannya dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersial dan penggunaan nonmiliter terhadap laut. Bahkan, ada pula yang menggunakan istilah maritim diartikan meliputi ketiga aspek di atas.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara maritim adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada penguasaan wilayah, perlindungan wilayah, serta beberapa aspek ekonomi seperti: pelayaran/ pengangkutan laut, perdagangan, wisata laut, pelabuhan, industri dan jasa-jasa maritim.

D. Laut dan Kekuasaan

Mahan (1949: 25-26) menemukan enam faktor yang menentukan berhasilnya negara tersebut menjadi *sea power*, sebagai berikut:

1. Lokasi Geografis dari Negara

Dilihat dari banyaknya lautan yang dimiliki suatu negara, yang komunikasi antar bagiannya berjalan baik dan musuh sulit menaklukannya. Atau lokasi suatu negara berupa kepulauan di depan suatu benua atau daratan.

2. Tata Letak Alami Negara yang Bersangkutan (*The Physical Lay Out Of The Stage*)

Mahan menulis bahwa negara kepulauan yang pantai-pantainya mudah dicapai dari pedalaman pulau-pulaunya, menjadikan penduduk negara tersebut berhubungan dengan dunia luar dengan lancar.

3. Cakupan Wilayah (*The Extens Of Territory*)

Hubungan antara panjangnya garis pantai dengan sulit-mudahnya wilayah tersebut dipertahankan pada masa perang.

4. Banyaknya Penduduk

Makin banyak penduduk makin cukup tersedia tenaga untuk dijadikan tentara darat maupun lautan.

5. Watak Nasional

Kecintaan tanah air, kebanggaan akan kebesaran sejarah masa lampau, ikut menentukan kuat lemahnya negara.

6. Politik Kenegaraan

Ini bertalian dengan kebijakan pemerinah intern negara (wilayah), memanfaatkan kepadatan penduduk dan sikap terhadap negara tetangga.

Apa yang digagaskan dan dihipotesiskan oleh Mahan sebenarnya sama dengan apa yang kemudian dikembangkan oleh Sir Halford Mackinder (1861-1947) yang dikutip oleh N. Daldjoeni (1991: 179) konsep Mackinder dikenal dengan sebutan *Eurasian Heartland* di mana diyakini bahwa barang siapa memiliki *heartland* itu ia akan menguasai dunia

E. Makna Laut Bagi Indonesia Secara Politik

Sehubungan dengan indikator penentu yang dikemukakan Mahan dan Mackinder, maka Indonesia sebagai negara maritim pada dasarnya memenuhi keenam indikator tersebut. Dilihat dari letak geografis, Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas dan letak strategis diantara dua benua dan dua samudera. Selanjutnya dilihat dari panjangnya garis pantai maka negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Namun jika dilihat dari cakupan wilayah, Negara Indonesia sebagian besar daerah pantainya masih memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang lebih lengkap agar tidak mudah dimasuki asing. Selanjutnya berdasarkan jumlah penduduk dan watak nasional maka Negara Indonesia memiliki potensi sumberdaya manusia yang memadai, jumlah penduduk yang besar dan sebagian bangsa kita adalah bangsa yang sudah mampu beradaptasi dengan laut, terutama mereka yang tinggal didaerah pesisir. Namun dalam hal kualitasnya untuk menjadi pelaut yang tangguh masih memerlukan peningkatan keterampilan dan keahlian yang memadai sesuai dengan ilmu kelautan yang modern.

Sehubungan dengan politik kenegaraan, pada dasarnya kebijakan pemerintah era reformasi ini telah memberikan peluang yang cukup besar untuk memajukan potensi laut nasional kita. Dengan perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang memberikan aturan ketat terhadap pemanfaatan pelayaran di laut-laut nusantara, keberanian beliau menenggelamkan banyak kapal nelayan asing yang memasuki dan mencuri sumber daya laut dan perikanan di wilayah etritorial Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa dalam eksistensinya sebagai negara maritim.

Bagi bangsa Indonesia laut mempunyai makna yang sangat penting. Dengan memiliki laut yang luas Indonesia sangat diuntungkan dari berbagai aspek, diantaranya aspek ekonomi, aspek politik, aspek social budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.

Ditinjau dari aspek politik laut merupakan komponen yang penting bagi bangsa Indonesia ketika berhubungan dengan Negara lain. Kita bisa ikut andil dalam menentukan sikap terhadap jalur transportasi dan jalur perdagangan dunia yang akan melintasi wilayah laut Indonesia.

Dengan luasnya wilayah laut Indonesia, bagi bangsa Indonesia laut bukanlah sebagai pemisah, namun harus dipandang sebagai media yang mempersatukan wilayah kepulauan Indonesia yang berjumlah ribuan pulau.

Kebijakan tol laut dari pemerintahan Joko Widodo perlu diberi apresiasi sebagai wujud upaya mempersatukan wilayah Negara kepulauan Indonesia, dengan kebijakan memperlancar dan mempermudah arus mobilitas manusia, barang dan jasa dari suatu pulau ke pulau lain yang berimplikasi pada terintegrasinya wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh.

Keberadaan Tol Laut ini diharapkan kedepannya akan mampu menselaraskan harga barang antara antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, sehingga tidak ada lagi perbedaan harga barang kebutuhan hidup manusia. Dan akan terwujudnya program pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur.

Bila dikemudian hari Tol laut ini terlaksana dengan baik, maka Negara Indonesia akan menjadi salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan Negara lain dalam globalisasi dimana kelancaran jalur transportasi menjadi salah satu komponen yang utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R. 2013. *Momentum Mengembalikan Kejayaan Negara Maritim*. Koran Sindo. 13 Desember 2013.
- Daljoeni. 1991. *Dasar-Dasar Geografi Politik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lapian, AB.. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke 16-17*. Depok: Komunitas Bambu
- Mahan, A. 1949. *The Influence Of The Sea Sower Upon History*.
- Marsetio. *Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mnedukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Tangguh*. E-Jurnal. 17 Maret 2017.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Tahar, Abdul Muthalib. 2007. *Zona-zona Maritim Berdasarkan KHL PBB 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*. Buku Ajar. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Zuhdi, Susanto. 2014. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu